



KPU dan Panwas Dilaporkan ke DKPP

TAK hanya ke MK, kubu Imam-Fadli juga menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Mereka melaporkan jajaran KPU dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Yogyakarta atas tuduhan inkonsisten dalam proses penyelenggaraan Pilwali Yogyakarta 2017.

Ketua Bapilu DPC PDIP Kota Yogyakarta Fokki Ardiyanto mengatakan, dasar pelaporan ke DKPP adalah sikap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam agar membuka seluruh surat suara tidak sah saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan.

Sejak awal pihaknya memang mempertanyakan kriteria penyebab surat suara tidak sah. Sebabnya tuntutan pembukaan seluruh surat suara tidak sah tak dituruti KPU. Dengan khawatir surat suara ti-

dak sah itu bukan karena salah mencoblos atau sengaja merusak surat suara, melainkan akibat kurangnya sosialisasi dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu pihaknya mempertanyakan banyaknya warga yang kehilangan hak pilih. Salah satunya keluarga Danu, 52, warga Baciwo, Kecamatan Umbulharjo. Dia ditolak KPPS saat akan menggunakan hak suaranya, padahal sudah memiliki surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Sejak awal kami hanya ingin ada jaminan agar hak konstitusi pemilih tidak hilang. Ada surat suara sah, tapi dinyatakan tidak sah. Ada pemilih siluman, yang masih hidup tak masuk DPT (daftar pemilih tetap), tapi yang sudah meninggal dunia justru dapat masuk DPT dan dapat C6 (undangan memilih)," jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto tetap menghargai upaya gugatan ke MK maupun pelaporan ke DKPP tersebut. Menurutnya hal itu merupakan hak setiap pasangan calon dan pihaknya siap mengikuti proses selanjutnya.

ASN Kembali Dilaporkan ke Panwas

Dilaporkannya enam orang aparatur sipil negara (ASN) ke Panwas Yogyakarta membuat Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistiyo tak habis pikir. Sebab jauh-jauh hari sebelum coblosan Pilwali 2017 dirinya sudah berkali-kali mengingatkan agar ASN bertindak netral.

"Saya sudah sering tekan kan tiap kali ada kesempatan (tatap muka dengan pegawai/pejabat), jaga netralitas. Jaga kondisi dan suasana damai dan kondusif Kota Yogyakarta. Ini ada lagi (yang dilapor-

kan)," ujarnya.

Dari 6 orang ASN yang dilaporkan ke Panwas pada Senin (27/2) lalu, 4 orang berstatus PNS dan 2 orang tenaga bantuan. Pelapor adalah relawan kubu Imam-Fadli, Chaniago Iseda. Saat melapor, Chaniago membawa bukti cetakan foto keenam pegawai itu tengah berkumpul bersama menggunakan t-shirt hitam berkerah yang bertuliskan H&H dan nomor 2 serta mengacungkan jari dua.

Sulistiyo pun berjanji akan menindak tegas anak buahnya yang terbukti melanggar aturan. "Nanti tunggu rekomendasi Panwas seperti apa," tandasnya.

Sementara itu Panwas Yogyakarta masih menyelidiki laporan tersebut untuk mendalami apakah memenuhi unsur pelanggaran pilkada maupun tindak pidana atau tidak.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005